

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN …

TENTANG

TATA KELOLA YANG BAIK BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

| Batang Tubuh RPOJK | Penjelasan | Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja | Tanggapan Tertulis | | Usulan Perubahan | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang: |  |  |  | |  | |
| bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 121 ayat (2) dan Pasal 269 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta untuk mendukung perkembangan industri dan kebutuhan hukum pengaturan tata kelola yang baik sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya; | 1. UMUM   Peranan sektor PVML, yang menjadi salah satu aspek penting dari sektor jasa keuangan, perlu untuk terus didukung dan diperkuat. PVML juga dituntut untuk terus selalu berdaya saing dan tanggap terhadap perubahan pada lingkungan eksternal dan internal yang semakin kompleks dan kompetitif disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas.  Penguatan penerapan Tata Kelola yang Baik pada PVML merupakan salah satu elemen utama untuk meningkatkan daya saing PVML. Tata Kelola yang Baik pada PVML akan berpengaruh positif terhadap kinerja PVML. Seiring perkembangan aktivitas dan produk keuangan maupun adopsi perkembangan teknologi informasi, kerangka peraturan Tata Kelola yang Baik pada PVML serta dukungan penerapan manajemen risiko yang efektif juga perlu untuk terus dilakukan penyempurnaan, untuk memastikan risiko baru yang muncul dapat diantisipasi secara efektif dan memastikan PVML didukung dengan penerapan tata kelola yang andal serta menjalankan praktik usaha yang sehat. Pengalaman menunjukkan bahwa kegagalan dalam penerapan Tata Kelola yang Baik pada PVML seringkali menjadi salah satu penyebab utama kegagalan PVML untuk bertahan dalam persaingan bisnis. Sehubungan hal tersebut, PVML terus dituntut untuk beroperasi dengan penerapan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan (*governance, risk, and compliance* atau *GRC*) yang andal dan terintegrasi dengan didukung digitalisasi dan inovasi teknologi, serta berwawasan lingkungan dan sosial (*environment, social, and governance atau ESG*), sehingga PVML mampu memenuhi peraturan perundang-undangan, standar, nilai-nilai etika, prinsip dan praktik yang berlaku umum, menjaga dan membangun fondasi penciptaan nilai serta mengoptimalkan capaian kinerja secara berkelanjutan, mengelola hak dan tanggung jawab, serta menjaga keseimbangan kepentingan pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan lain (*stakeholders*) dalam upaya untuk berkontribusi lebih luas dalam menggerakkan perekonomian nasional.  Dalam tatanan regulasi Otoritas Jasa Keuangan, perlu adanya keselarasan dan sinergi pengaturan terkait penerapan Tata Kelola yang Baik pada PVML, termasuk penerapan tata kelola yang diatur dalam suatu ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tersendiri, serta mengacu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, agar Tata Kelola yang Baik dapat diterapkan oleh seluruh PVML diperlukan pengaturan mengenai Tata Kelola yang Baik secara terintegrasi dengan tetap memperhatikan karakteristik setiap industri di PVML. Oleh karena itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini juga menjadi payung pengaturan terkait penerapan tata kelola bagi PVML. Dengan demikian, penerapan Tata Kelola yang Baik pada PVML dalam setiap aktivitas usaha dan *lines of defenses* PVML diharapkan akan memberikan kontribusi positif dalam mendukung penguatan dan daya saing PVML, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan (*sustainable*), sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, dan bermartabat. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendukung penguatan aturan terkait dengan Tata Kelola yang Baik pada PVML, diperlukan penetapan pengaturan mengenai Penerapan Tata Kelola yang Baik bagi PVML. |  |  | |  | |
| Mengingat: |  |  |  | |  | |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  | |  | |
| 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| Menetapkan: |  |  |  | |  | |
| MEMUTUSKAN: |  |  |  | |  | |
| TATA KELOLA YANG BAIK BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA. |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| KETENTUAN UMUM | 1. PASAL DEMI PASAL |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: |  |  |  | |  | |
| 1. Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang selanjutnya disebut PVML adalah: |  |  |  | |  | |
| 1. lembaga pembiayaan, meliputi: |  |  |  | |  | |
| 1. perusahaan pembiayaan; dan |  |  |  | |  | |
| 1. perusahaan pembiayaan infrastruktur; |  |  |  | |  | |
| 1. perusahaan modal ventura; |  |  |  | |  | |
| 1. lembaga keuangan mikro; dan |  |  |  | |  | |
| 1. lembaga jasa keuangan lainnya, meliputi: |  |  |  | |  | |
| 1. perusahaan pergadaian; dan |  |  |  | |  | |
| 1. penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, |  |  |  | |  | |
| termasuk yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. |  |  |  | |  | |
| 1. Perusahaan Pembiayaan adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat, termasuk yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan. |  |  |  | |  | |
| 1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan hukum yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur, termasuk yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan infrastruktur. |  |  |  | |  | |
| 1. Perusahaan Modal Ventura adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, termasuk yang melakukan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan modal ventura. |  |  |  | |  | |
| 1. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga keuangan mikro. |  |  |  | |  | |
| 1. Perusahaan Pergadaian adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak, termasuk yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pergadaian. |  |  |  | |  | |
| 1. Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. |  |  |  | |  | |
| 1. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. |  |  |  | |  | |
| 1. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat PVML yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. |  |  |  | |  | |
| 1. Tata Kelola yang Baik bagi PVML yang selanjutnya disebut Tata Kelola yang Baik adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ PVML untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai PVML bagi seluruh pemangku kepentingan secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika. |  |  |  | |  | |
| 1. Organ PVML adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris bagi PVML yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara bagi PVML yang berbadan hukum koperasi. |  |  |  | |  | |
| 1. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap PVML, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain debitur, anggota/pemegang saham, karyawan, kreditur, penyedia barang dan jasa, dan/atau pemerintah. |  |  |  | |  | |
| 1. Debitur adalah orang perseorangan atau perusahaan yang menerima pembiayaan dari PMVL. |  |  |  | |  | |
| 1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar bagi PVML berbadan hukum perseroan terbatas atau yang setara bagi badan hukum berbentuk koperasi. |  |  |  | |  | |
| 1. Direksi adalah organ PVML yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PVML untuk kepentingan PVML, sesuai dengan maksud dan tujuan PVML serta mewakili PVML, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi PVML yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi PVML yang berbentuk badan hukum koperasi. |  |  |  | |  | |
| 1. Dewan Komisaris adalah organ PVML yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi PVML yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi PVML yang berbentuk badan hukum koperasi. |  |  |  | |  | |
| 1. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan PVML agar sesuai dengan Prinsip Syariah. |  |  |  | |  | |
| 1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota DPS, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau anggota DPS atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. |  |  |  | |  | |
| 1. Pihak Independen adalah pihak di luar PVML yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan PVML yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen. |  |  |  | |  | |
| 1. Pejabat Eksekutif adalah pejabat PVML yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional PVML. |  |  |  | |  | |
| 1. Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis PVML dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS, serta pegawai PVML. |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. PVML wajib menerapkan Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Prinsip Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: |  |  |  | |  | |
| 1. keterbukaan; | Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. |  |  | |  | |
| 1. akuntabilitas; | Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungiawaban. |  |  | |  | |
| 1. tanggung jawab; | Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” mencakup kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik. |  |  | |  | |
| 1. independensi; dan | Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah mencakup keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik. |  |  | |  | |
| 1. kewajaran. | Yang dimaksud dengan “kewajaran” adalah mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik. |  |  | |  | |
| 1. Penerapan Tata Kelola yang Baik bertujuan untuk: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. mengoptimalkan nilai PVML bagi Pemangku Kepentingan, khususnya Debitur, penerima dana, kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya; |  |  |  | |  | |
| 1. meningkatkan pengelolaan PVML secara profesional, efektif, dan efisien; |  |  |  | |  | |
| 1. meningkatkan kepatuhan Organ PVML dan DPS serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial PVML terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan; |  |  |  | |  | |
| 1. mewujudkan PVML yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, kompetitif, dan memenuhi prinsip perlindungan konsumen; dan |  |  |  | |  | |
| 1. meningkatkan kontribusi PVML dalam perekonomian nasional. |  |  |  | |  | |
| 1. Penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit diwujudkan dalam: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. pelaksanaan tugas dan wewenang pemegang saham dan RUPS; |  |  |  | |  | |
| 1. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; |  |  |  | |  | |
| 1. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; |  |  |  | |  | |
| 1. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS; |  |  |  | |  | |
| 1. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite; |  |  |  | |  | |
| 1. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal; |  |  |  | |  | |
| 1. penerapan fungsi kepatuhan; |  |  |  | |  | |
| 1. penerapan fungsi audit internal dan audit eksternal; |  |  |  | |  | |
| 1. penanganan Benturan Kepentingan; |  |  |  | |  | |
| 1. penerapan kebijakan remunerasi; |  |  |  | |  | |
| 1. keterbukaan informasi; |  |  |  | |  | |
| 1. etika bisnis; |  |  |  | |  | |
| 1. kebijakan pembiayaan; |  |  |  | |  | |
| 1. penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan |  |  |  | |  | |
| 1. rencana bisnis. |  |  |  | |  | |
| 1. Dalam melakukan kegiatan usaha, PVML wajib menyelenggarakan kegiatan usahanya secara sehat dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan industri jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Selain penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PVML harus mengikuti perkembangan dinamika industri untuk mendorong penerapan Tata Kelola yang Baik pada PVML. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. PVML wajib memiliki standar operasi dan prosedur mengenai penerapan Tata Kelola yang Baik untuk seluruh kegiatan usaha PVML yang ditetapkan oleh Direksi. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. PVML wajib melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap standar operasi dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| * + 1. PVML yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (5) dan/atau Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi administratif berupa: | Pengenaan sanksi administratif mempertimbangkan antara lain:   1. dampak pelanggaran ketentuan terhadap kerugian konsumen, kondisi Penyelenggara, dan sektor jasa keuangan; 2. kompleksitas pelanggaran ketentuan; 3. kondisi keuangan Penyelenggara; dan/atau 4. pelanggaran ketentuan yang berulang. |  |  | |  | |
| * + - 1. peringatan tertulis; |  |  |  | |  | |
| * + - 1. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; |  |  |  | |  | |
| * + - 1. pembatasan kegiatan usaha tertentu; |  |  |  | |  | |
| * + - 1. pembatalan persetujuan; dan |  |  |  | |  | |
| * + - 1. denda administratif. |  |  |  | |  | |
| * + 1. Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |  |  |  | |  | |
| * + 1. Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). |  |  |  | |  | |
| * + 1. Dalam hal PVML dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang: |  |  |  | |  | |
| * + - 1. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan PVML; | Yang dimaksud dengan “menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan PVML” adalah Otoritas Jasa Keuangan dapat menurunkan tingkat kesehatan PVML terhadap hasil penilaian tingkat kesehatan komposit dan/atau hasil penilaian untuk masing-masing faktor penilaian tingkat kesehatan. Ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan PVML mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank beserta peraturan pelaksanaannya. |  |  | |  | |
| * + - 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau | Pelaksanaan penilaian kembali terhadap pihak utama PVML mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  | |  | |
| * + - 1. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Pemegang saham pengendali wajib memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. | Yang dimaksud dengan "pemegang saham pengendali" adalah pemegang saham pengendali sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. |  |  | |  | |
| 1. Pemegang saham pengendali wajib mendukung terlaksananya kegiatan usaha dan pengelolaan PVML yang sehat, berdaya saing serta sesuai prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. | Pemegang saham mendukung terlaksananya kegiatan usaha dan pengelolaan PVML yang sehat, berdaya saing serta sesuai prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, termasuk dengan tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional PVML bagi pemegang saham yang selain menjadi pengurus atau pegawai PVML (termasuk memengaruhi pengambilan keputusan operasional PVML) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai PVML. |  |  | |  | |
| 1. Pemegang saham PVML turut serta mendukung terlaksananya kegiatan usaha PVML yang sehat dan menjaga kesinambungan usaha PVML. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Setiap pihak yang menjadi pemegang saham pengendali PVML wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| Pemegang saham harus memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional PVML. | Yang termasuk contoh komitmen antara lain apabila dibutuhkan khususnya untuk menjaga tingkat kesehatan PVML, pemegang saham bersedia meningkatkan dana operasional PVML antara lain menambah modal disetor, pinjaman subordinasi dan/atau perubahan komposisi/jumlah pemegang saham. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Pemegang saham PVML dilarang mencampuri kegiatan operasional PVML yang menjadi tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PVML dan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban selaku RUPS. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Pemegang saham PVML yang menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada PVML yang sama harus mendahulukan kepentingan PVML. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| Tindakan pelepasan saham PVML yang dimiliki oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite PVML, DPS, Pejabat Eksekutif, dan/atau pegawai PVML yang berasal dari program kepemilikan saham bagi manajemen dan/atau program kepemilikan saham bagi karyawan wajib dilaksanakan dengan memperhatikan Tata Kelola yang Baik pada PVML dan mempertimbangkan kondisi PVML. | Yang dimaksud dengan mempertimbangkan kondisi PVML antara lain tidak melakukan pelepasan saham yang akan membuat atau menambah risiko pada PVML dan/atau dimaksudkan untuk melepaskan kepemilikan saham agar terhindar dari kerugian sehubungan adanya potensi atau terjadinya permasalahan pada PVML. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. RUPS wajib diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar PVML yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Dalam mengambil keputusan, RUPS harus menjaga kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Debitur, penerima dana, kreditur, dan kepentingan pemegang saham minoritas. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| * + 1. PVML yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi administratif berupa: | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (1). |  |  | |  | |
| * + - 1. peringatan tertulis; |  |  |  | |  | |
| * + - 1. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; |  |  |  | |  | |
| * + - 1. pembatasan kegiatan usaha tertentu; |  |  |  | |  | |
| * + - 1. pembatalan persetujuan; dan |  |  |  | |  | |
| * + - 1. denda administratif. |  |  |  | |  | |
| * + 1. Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Dalam hal PVML dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang: |  |  |  | |  | |
| * + - 1. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan PVML; | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (6) huruf a. |  |  | |  | |
| * + - 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (6) huruf b. |  |  | |  | |
| * + - 1. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| DIREKSI |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. PVML yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. PVML yang memiliki aset sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Salah seorang anggota Direksi wajib diangkat sebagai direktur utama. | PVML dapat menggunakan penamaan jabatan lain dari direktur utama misalnya presiden direktur. |  |  | |  | |
| 1. Dalam hal diperlukan, anggota Direksi lain dapat diangkat sebagai wakil direktur utama. | PVML dapat menggunakan penamaan jabatan lain dari wakil direktur utama misalnya wakil presiden direktur. |  |  | |  | |
| 1. Direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. | Yang dimaksud dengan “pemegang saham pengendali” adalah pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Penilaian independensi didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan pada kepengurusan, kepemilikan, dan/atau hubungan keuangan, serta hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. PVML yang di dalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung kurang dari 25% (dua puluh lima persen), wajib memastikan bahwa seluruh anggota Direksi merupakan warga negara Indonesia. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. PVML yang di dalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dapat memiliki Direksi yang merupakan warga negara asing. |  |  |  | |  | |
| 1. PVML yang di dalamnya terdapat kepemilikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memastikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Direksi merupakan warga negara Indonesia. | Berdasarkan ketentuan ini, apabila jumlah anggota Direksi genap maka jumlah anggota Direksi yang memiliki kewarganegaraan Indonesia sekurang-kurangnya harus sama dengan jumlah Direksi yang merupakan warga negara asing.  Sedangkan apabila jumlah anggota Direksi ganjil maka jumlah anggota Direksi yang memiliki kewarganegaraan Indonesia harus lebih banyak dari pada anggota Direksi merupakan warga negara asing. Sebagai contoh, apabila jumlah anggota Direksi 3 (tiga) orang, maka jumlah anggota Direksi berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 2 (dua) orang. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. PVML wajib memastikan bahwa anggota Direksi: | Bagi perusahaan pergadaian atau LKM dengan lingkup wilayah kabupaten/kota, anggota Direksi berdomisili di kabupaten/kota  sesuai dengan lingkup wilayah usaha perusahaan dimaksud. |  |  | |  | |
| 1. berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia; dan |  |  |  | |  | |
| 1. berdomisili dalam lingkup wilayah operasional PVML yang bersangkutan. |  |  |  | |  | |
| 1. Bagi anggota Direksi berkewarganegaraan asing wajib memiliki: | Cukup jelas |  |  | |  | |
| 1. surat izin menetap; dan |  |  |  | |  | |
| 1. surat izin bekerja, |  |  |  | |  | |
| dari instansi berwenang. |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Bagi PVML yang membentuk komite remunerasi dan nominasi wajib memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi dalam setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. | Memperhatikan keberagaman antara lain latar belakang karier, pengalaman, riwayat pendidikan, dan gender. |  |  | |  | |
| 1. PVML menetapkan dalam anggaran dasar mengenai tugas, wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi, termasuk kewenangan yang melekat kepada Direksi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Penetapan dimaksud bertujuan agar pelaksanaan kepengurusan Bank terlaksana dengan baik. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi wajib mengedepankan kepentingan utama dari PVML. | Pemberhentian anggota Direksi termasuk pemberhentian sementara anggota Direksi. Pembatasan kewenangan anggota Direksi yang diberhentikan sementara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  | |  | |
| 1. Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir wajib memperhatikan paling sedikit: |  |  |  | |  | |
| 1. anggota Direksi dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi PVML yang sehat; | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan PVML; | Penilaian yang objektif terkait pengelolaan PVML antara lain terkait aspek kinerja, integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi. |  |  | |  | |
| 1. bagi PVML yang membentuk komite rmunerasi dan nominasi, pemberhentian atau penggantian anggota Direksi telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite remunerasi dan nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS; dan | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. terdapat informasi bahwa anggota Direksi termasuk dalam pihak yang dilarang sebagai pihak utama. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi terhadap keputusan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Direksi berakhir. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir melalui pemberitahuan tertulis kepada PVML. | Tata cara pengunduran diri anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dicantumkan dalam anggaran dasar PVML. |  |  | |  | |
| 1. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah minimal anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pengunduran diri tersebut berlaku efektif jika telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi baru yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan evaluasi dan tindakan korektif terhadap pengunduran diri anggota Direksi untuk menilai pengunduran diri dilakukan secara sukarela, terdapat unsur paksaan, atau kondisi lain. | Yang dimaksud dengan “kondisi lain” adalah pengunduran diri anggota Direksi yang dimaksudkan untuk melepaskan tanggung jawab sebagai anggota Direksi dalam penanganan permasalahan PVML. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Anggota Direksi dilarang melakukan rangkap jabatan: | Direksi tidak dapat melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain baik di Perusahaan Pembiayaan maupun perusahaan non pembiayaan. |  |  | |  | |
| * 1. sebagai DPS pada perusahaan yang sama; | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * 1. sebagai anggota direksi, dan/atau pejabat eksekutif pada perusahaan dan/atau lembaga lain; | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * 1. sebagai anggota dewan komisaris dan/atau dewan pengawas syariah pada lebih dari 1 (satu) perusahaan dan/atau lembaga lain; | Sebagai contoh, dalam hal seseorang telah menjabat sebagai Direksi di Perusahaan Pembiayaan, maka diperkenankan untuk merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris paling banyak pada 1 (satu) perusahaan lain, baik Perusahaan Pembiayaan atau perusahaan non pembiayaan. |  |  | |  | |
| * 1. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi; dan/atau | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * 1. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila anggota Direksi: |  |  |  | |  | |
| * 1. bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan PVML pada perusahaan anak, yang menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan komisaris pada perusahaan anak yang dikendalikan oleh PVML; | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * 1. merupakan pengurus asosiasi yang menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh asosiasi; | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * 1. merupakan pengurus asosiasi yang menjalankan tugas fungsional menjadi dewan komisaris pada lembaga berdasarkan penunjukan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau | Yang dimaksud dengan “lembaga” antara lain lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang didirikan oleh *self regulatory organizations* (SROs) dan asosiasi-asosiasi di lingkungan sektor jasa keuangan. |  |  | |  | |
| * 1. menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, | Organisasi atau lembaga nirlaba termasuk keanggotaan dalam komite (*task force*) pada bidang tertentu di luar PVML. |  |  | |  | |
| sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi. |  |  |  | |  | |
| 1. Pelaksanaan kegiatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * 1. ayat (2) huruf a wajib mendapatkan persetujuan dari rapat Dewan Komisaris; dan/atau |  |  |  | |  | |
| * 1. ayat (2) huruf d dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris. |  |  |  | |  | |
| 1. Terhadap calon anggota Direksi yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d, wajib membuat pernyataan untuk: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * 1. menjaga integritas; |  |  |  | |  | |
| * 1. menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan |  |  |  | |  | |
| * 1. menghindari tindakan yang dapat merugikan PVML dan/atau menyebabkan PVML melanggar prinsip kehati-hatian, |  |  |  | |  | |
| selama menjabat sebagai anggota Direksi. |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. PVML dilarang mengangkat anggota Direksi yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. PVML dilarang mengangkat anggota Direksi yang berasal dari mantan pegawai atau pejabat Otoritas Jasa Keuangan apabila yang bersangkutan berhenti bekerja dari Otoritas Jasa Keuangan kurang dari 6 (enam) bulan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. PVML wajib memastikan setiap calon anggota Direksi memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Kewajiban untuk memperoleh persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi LKM skala usaha menengah dan kecil. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Bagi PVML yang berbadan hukum koperasi dan memiliki pengelola, PVML wajib memastikan setiap calon pengelola memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan. |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Direksi wajib: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari PVML dalam melaksanakan tugasnya; |  |  |  | |  | |
| 1. mengelola PVML sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian; |  |  |  | |  | |
| 1. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS; |  |  |  | |  | |
| 1. memastikan agar PVML memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Debitur, penerima dana, kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya; |  |  |  | |  | |
| 1. memastikan agar informasi mengenai PVML diberikan kepada Dewan Komisaris secara akurat, relevan, dan tepat waktu; |  |  |  | |  | |
| 1. memastikan agar informasi mengenai PVML diberikan kepada DPS secara akurat, relevan, dan tepat waktu; dan |  |  |  | |  | |
| 1. membantu dan menyediakan fasilitas dan/atau sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang organ PVML dan DPS. |  |  |  | |  | |
| 1. Direksi berwenang mewakili PVML sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal PVML, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| Anggota Direksi dilarang: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat; |  |  |  | |  | |
| 1. memanfaatkan jabatannya pada PVML tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PVML tempat anggota Direksi dimaksud menjabat; |  |  |  | |  | |
| 1. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari PVML tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; |  |  |  | |  | |
| 1. memenuhi permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional PVML tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam RUPS; dan |  |  |  | |  | |
| 1. memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. | Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pegawai PVML atau orang lain. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. | Pedoman dan tata tertib kerja Direksi dikenal juga dengan piagam Direksi. |  |  | |  | |
| 1. Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib mencantumkan: |  |  |  | |  | |
| 1. pengorganisasian PVML dan pembidangan tugas Direksi; | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Direksi; | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. pengaturan etika kerja Direksi; | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. pengaturan rapat Direksi; | Pengaturan rapat antara lain mengatur tentang agenda rapat, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan, hak anggota dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan, dan risalah rapat. |  |  | |  | |
| 1. larangan terhadap Direksi; | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. evaluasi kinerja Direksi; dan | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. pola hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris. | Pola hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris antara lain melalui rapat antara Direksi dan Dewan Komisaris. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk penggunaan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional dengan ketentuan: |  |  |  | |  | |
| 1. untuk proyek bersifat khusus; | Termasuk dalam kategori proyek yang bersifat khusus antara lain proyek teknologi informasi atau pengembangan kehumasan (*public relations*) yang memiliki kriteria seperti adanya target waktu tertentu. |  |  | |  | |
| 1. berdasarkan pada kontrak kerja yang jelas; | Kontrak kerja yang jelas paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, hak dan tanggung jawab, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya. |  |  | |  | |
| 1. dilaksanakan oleh Pihak Independen yang memiliki pengetahuan teknis tertentu dengan standar kualifikasi keahlian yang memadai untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a; | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan struktural pada PVML; dan | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional PVML. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Direksi wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Pelaksanaan rapat Direksi dapat dilaksanakan melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam kondisi tertentu antara lain kondisi kahar (*force majeure*). | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Direksi wajib melaksanakan rapat bersama dengan Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dapat dilaksanakan melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. | Yang dimaksud dengan “kebijakan dan keputusan strategis” adalah keputusan Direksi yang dapat memengaruhi keuangan PVML secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan/atau pihak ketiga. |  |  | |  | |
| 1. Pengambilan keputusan Direksi melalui rapat Direksi wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Hasil rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*)yang terjadi dalam keputusan rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*)tersebut. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Anggota Direksi yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Jumlah rapat Direksi yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola yang Baik. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| Direksi harus menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| * + 1. PVML yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), ayat (3) huruf a, dan ayat (4), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dan/atau Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi administratif berupa: | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (1). |  |  | |  | |
| * + - 1. peringatan tertulis; |  |  |  | |  | |
| * + - 1. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; |  |  |  | |  | |
| * + - 1. pembatasan kegiatan usaha tertentu; |  |  |  | |  | |
| * + - 1. pembatalan persetujuan; dan |  |  |  | |  | |
| * + - 1. denda administratif. |  |  |  | |  | |
| * + 1. Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Dalam hal PVML dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang: |  |  |  | |  | |
| * + - 1. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan PVML; | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (6) huruf a. |  |  | |  | |
| * + - 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (6) huruf b. |  |  | |  | |
| * + - 1. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| DEWAN KOMISARIS |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. PVML yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. | Jumlah Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen. |  |  | |  | |
| 1. PVML yang memiliki aset sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. PVML wajib memastikan jumlah Dewan Komisaris paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Salah seorang anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) wajib diangkat sebagai komisaris utama. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Dalam hal diperlukan, anggota Dewan Komisaris lain dapat diangkat sebagai wakil komisaris utama. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. PVML yang di dalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung kurang dari 25% (dua puluh lima persen) wajib memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan warga negara Indonesia. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. PVML yang di dalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dapat memiliki Dewan Komisaris yang merupakan warga negara asing. | Cukup jelas |  |  | |  | |
| 1. PVML yang di dalamnya terdapat kepemilikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memastikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris merupakan warga negara Indonesia. |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. PVML yang di dalamnya tidak terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. | Bagi perusahaan pergadaian atau LKM dengan lingkup wilayah kabupaten/kota, anggota Dewan Komisaris berdomisili di kabupaten/kota  sesuai dengan lingkup wilayah usaha perusahaan dimaksud. |  |  | |  | |
| 1. PVML yang di dalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung kurang dari 25% (dua puluh lima persen) wajib memastikan bahwa paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Bagi anggota Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia wajib memiliki: | Cukup jelas |  |  | |  | |
| 1. surat izin menetap; dan |  |  |  | |  | |
| 1. surat izin bekerja, |  |  |  | |  | |
| dari instansi berwenang. |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Bagi PVML yang membentuk komite remunerasi dan nominasi wajib memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi dalam setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Anggota komite remunerasi dan nominasi yang memiliki Benturan Kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan. |  |  |  | |  | |
| 1. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. PVML menetapkan dalam anggaran dasar mengenai tugas, wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris, termasuk kewenangan yang melekat kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| Ketentuan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan ketentuan pengenaan sanksi terkait pemberhentian atau penggantian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi anggota Dewan Komisaris. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| Ketentuan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi anggota Dewan Komisaris. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| Ketentuan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan tindakan korektif dan evaluasi terhadap tindakan pengangkatan, pemberhentian, penggantian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) berlaku secara *mutatis mutandis* bagi anggota Dewan Komisaris. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan: | Cukup jelas |  |  | |  | |
| * 1. sebagai anggota direksi dan/atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) perusahaan dan/atau lembaga lain; |  |  |  | |  | |
| * 1. sebagai anggota dewan komisaris dan/atau dewan pengawas syariah pada lebih dari 1 (satu) perusahaan dan/atau lembaga lain; |  |  |  | |  | |
| * 1. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau |  |  |  | |  | |
| * 1. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |  | |  | |
| 1. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila: | Termasuk dalam pengertian menjalankan tugas fungsional yaitu apabila fungsi yang bersangkutan pada Perusahaan dan/atau kelompok usaha badan hukum pemegang saham Perusahaan termasuk anak Perusahaan adalah untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil dari pemegang saham Perusahaan, seperti anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi. |  |  | |  | |
| 1. anggota Dewan Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham PVML yang berbentuk badan hukum menjadi anggota dewan komisaris pada perusahaan anak dalam kelompok usahanya; | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. merupakan pengurus asosiasi yang menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh asosiasi; |  |  |  | |  | |
| 1. merupakan pengurus asosiasi yang menjalankan tugas fungsional menjadi dewan komisaris pada lembaga berdasarkan penunjukan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau | Yang dimaksud dengan “lembaga” antara lain lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang didirikan oleh *self regulatory organizations* (SROs) dan asosiasi-asosiasi di lingkungan sektor jasa keuangan. |  |  | |  | |
| 1. anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Dewan Komisaris. |  |  |  | |  | |
| 1. Terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membuat pernyataan untuk: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. menjaga integritas; |  |  |  | |  | |
| 1. menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan |  |  |  | |  | |
| 1. menghindari tindakan yang dapat merugikan PVML dan/atau menyebabkan PVML melanggar prinsip kehati-hatian, |  |  |  | |  | |
| selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris. |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. PVML dilarang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. PVML dilarang mengangkat anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan pegawai atau pejabat Otoritas Jasa Keuangan apabila yang bersangkutan berhenti bekerja dari Otoritas Jasa Keuangan kurang dari 6 (enam) bulan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan tidak pernah menjadi anggota Direksi pada PVML yang sama dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Setiap anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi LKM skala usaha menengah dan kecil. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| * + 1. Dewan Komisaris wajib: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi; |  |  |  | |  | |
| 1. melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian; |  |  |  | |  | |
| 1. mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak; |  |  |  | |  | |
| 1. menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola yang Baik; |  |  |  | |  | |
| 1. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi efektifitas penerapan Tata Kelola yang Baik, manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal; |  |  |  | |  | |
| 1. memberikan persetujuan dalam hal DPS memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris; dan |  |  |  | |  | |
| 1. memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal PVML, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. |  |  |  | |  | |
| * + 1. Dewan Komisaris wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| Anggota Dewan Komisaris dilarang: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan PVML tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat; |  |  |  | |  | |
| 1. memanfaatkan jabatannya pada PVML tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PVML tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat; |  |  |  | |  | |
| 1. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari PVML tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan |  |  |  | |  | |
| 1. mencampuri kegiatan operasional PVML yang menjadi tanggung jawab Direksi. |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| Anggota Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai PVML secara akurat, relevan, dan tepat waktu. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| * + 1. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan/atau |  |  |  | |  | |
| 1. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PVML. |  |  |  | |  | |
| * + 1. Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. | Pedoman dan tata tertib kerja Direksi dikenal juga dengan piagam Dewan Komisaris. |  |  | |  | |
| 1. Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib mencantumkan: |  |  |  | |  | |
| 1. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Dewan Komisaris; | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. pengaturan etika kerja Dewan Komisaris; | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. pengaturan rapat Dewan Komisaris; | Pengaturan rapat antara lain mengatur tentang agenda rapat, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan, hak anggota dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan, dan risalah rapat. |  |  | |  | |
| 1. larangan terhadap Dewan Komisaris; | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. evaluasi kinerja Dewan Komisaris; dan | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi. | Pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi antara lain melalui rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| PVML yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| Komisaris Independen PVML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * 1. tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan/atau DPS pada PVML yang sama; | Yang dimaksud dengan afiliasi adalah:   * 1. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Perusahaan;   2. hubungan dengan Perusahaan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris;   3. hubungan pengendalian dengan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung;   4. hubungan kepemilikan saham dalam Perusahaan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih; dan/atau   5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama. |  |  | |  | |
| * 1. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan/atau Pejabat Eksekutif pada PVML yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir; | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * 1. memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * 1. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan PVML tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat; | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * 1. memiliki kewarganegaraan Indonesia; dan | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * 1. berdomisili di Indonesia. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| Komisaris Independen PVML dilarang melakukan perangkapan jabatan sebagai Komisaris Independen pada PVML lain yang sejenis. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Debitur, penerima dana, kreditur, dan Pemangku Kepentingan lainnya. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Dalam hal PVML memiliki Dewan Komisaris lebih dari 1 (satu) orang, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dapat dilaksanakan melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi. | Bentuk rapat disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan antara lain dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi.  Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi dilaksanakan dalam kondisi tertentu antara lain kondisi kahar (*force majeure).* |  |  | |  | |
| 1. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat bersama dengan Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dapat dilaksanakan melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Pengambilan keputusan Dewan Komisaris melalui rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Hasil rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Perbedaan pendapat *(dissenting opinions)* yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat tersebut. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Anggota Dewan Komisaris yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola yang Baik. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| * + 1. PVML yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 41, Pasal 42 ayat (2), Pasal 43, Pasal 44, Pasal 46 ayat (1), Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50, dan/atau Pasal 52 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi administratif berupa: | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (1). |  |  | |  | |
| * + - 1. peringatan tertulis; |  |  |  | |  | |
| * + - 1. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; |  |  |  | |  | |
| * + - 1. pembatasan kegiatan usaha tertentu; |  |  |  | |  | |
| * + - 1. pembatalan persetujuan; dan |  |  |  | |  | |
| * + - 1. denda administratif. |  |  |  | |  | |
| * + 1. Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Dalam hal PVML dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang: |  |  |  | |  | |
| * + - 1. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan PVML; | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (6) huruf a. |  |  | |  | |
| * + - 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (6) huruf b. |  |  | |  | |
| * + - 1. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| DEWAN PENGAWAS SYARIAH |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. PVML yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan UUS wajib memiliki DPS. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam RUPS. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Bagi PVML yang membentuk komite remunerasi dan nominasi wajib memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi dalam setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian DPS kepada RUPS. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Anggota komite remunerasi dan nominasi yang memiliki Benturan Kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Pengangkatan dan/atau penggantian DPS mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. PVML menetapkan dalam anggaran dasar mengenai tugas, wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan DPS, termasuk kewenangan yang melekat kepada DPS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| Ketentuan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan ketentuan pengenaan sanksi terkait pemberhentian atau penggantian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi DPS. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| Ketentuan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku secara *mutatis mutandis* bagi DPS. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| Ketentuan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan tindakan korektif dan evaluasi terhadap tindakan pengangkatan, pemberhentian, penggantian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) berlaku secara *mutatis mutandis* bagi DPS. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. DPS dilarang melakukan rangkap jabatan: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * 1. sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pejabat eksekutif pada perusahaan yang sama; |  |  |  | |  | |
| * 1. sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) perusahaan dan/atau lembaga lain; |  |  |  | |  | |
| * 1. sebagai anggota dewan komisaris dan/atau dewan pengawas syariah pada lebih dari 3 (tiga) perusahaan dan/atau lembaga lain; | Sebagai contoh ketentuan DPS memiliki rangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris dan DPS pada 2 (dua) perusahaan lain, yaitu:  A merupakan anggota DPS dari perusahaan pembiayaan syariah O.  A rangkap jabatan sebagai:   * DPS pada Perusahaan Pembiayaan P; dan * anggota dewan komisaris pada perusahaan penjaminan. |  |  | |  | |
| * 1. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai DPS; dan/atau |  |  |  | |  | |
| * 1. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |  | |  | |
| 1. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila DPS: | Termasuk dalam pengertian menjalankan tugas fungsional yaitu apabila fungsi yang bersangkutan pada Perusahaan dan/atau kelompok usaha badan hukum pemegang saham Perusahaan termasuk anak Perusahaan adalah untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil dari pemegang saham Perusahaan, seperti anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi. |  |  | |  | |
| 1. menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham PVML yang berbentuk badan hukum menjadi anggota dewan komisaris pada perusahaan anak dalam kelompok usahanya; dan/atau | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai DPS. |  |  |  | |  | |
| 1. Terhadap calon DPS yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib membuat pernyataan untuk: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * 1. menjaga integritas; |  |  |  | |  | |
| * 1. menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan |  |  |  | |  | |
| * 1. menghindari tindakan yang dapat merugikan PVML dan/atau menyebabkan PVML melanggar prinsip kehati-hatian, |  |  |  | |  | |
| selama menjabat sebagai DPS. |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. PVML dilarang mengangkat DPS yang berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. PVML dilarang mengangkat anggota Direksi yang berasal dari mantan pegawai atau pejabat Otoritas Jasa Keuangan apabila yang bersangkutan berhenti bekerja dari Otoritas Jasa Keuangan kurang dari 6 (enam) bulan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Setiap anggota DPS wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi LKM skala usaha menengah dan kecil. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. DPS wajib: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. melaksanakan tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat serta saran kepada kepada Direksi agar kegiatan PVML atau UUS sesuai dengan Prinsip Syariah; |  |  |  | |  | |
| 1. melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian; |  |  |  | |  | |
| 1. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi efektifitas penerapan Tata Kelola yang Baik, manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal; dan |  |  |  | |  | |
| 1. melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal PVML, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain, terkait penerapan Prinsip Syariah. |  |  |  | |  | |
| 1. Pelaksanaan tugas yang dilakukan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; |  |  |  | |  | |
| 1. akad usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dipasarkan oleh PVML dan UUS; dan |  |  |  | |  | |
| 1. praktik pemasaran usaha berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh PVML dan UUS. |  |  |  | |  | |
| 1. DPS wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Dalam melaksanakan tugas yang dilakukan oleh DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPS dapat dibantu oleh anggota komite dan/atau pegawai yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris dan/atau Direksi. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimuat dalam anggaran dasar PVML. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| DPS dilarang: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan PVML dan UUS tempat DPS dimaksud menjabat; |  |  |  | |  | |
| 1. memanfaatkan jabatannya pada DPS dan UUS tempat DPS dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan PVML dan UUS tempat anggota DPS dimaksud menjabat; dan |  |  |  | |  | |
| 1. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari PVML dan UUS tempat DPS dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| DPS berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai PVML secara akurat, relevan, dan tepat waktu. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Dalam hal DPS menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang terkait dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, DPS wajib meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Dalam hal Direksi menolak hasil penilaian DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPS wajib melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penjelasan anggota Direksi diterima oleh DPS. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Dalam hal Direksi menerima hasil penilaian DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPS meminta Direksi untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan anggota Direksi tersebut agar sesuai dengan Prinsip Syariah. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Dalam hal anggota Direksi tidak melakukan perbaikan terhadap kebijakan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPS wajib segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditembuskan kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya perbaikan dimaksud. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. DPS wajib menyelenggarakan rapat dengan Pejabat Eksekutif atau pimpinan UUS secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan yang dapat dilakukan melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Hasil rapat DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat DPS dan didokumentasikan dengan baik. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat DPS wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat DPS disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Anggota DPS yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat DPS berhak menerima salinan risalah rapat DPS. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota DPS harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola yang Baik. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| * + 1. PVML yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 63, Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dan/atau Pasal 66 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi administratif berupa: | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (1). |  |  | |  | |
| * + - 1. peringatan tertulis; |  |  |  | |  | |
| * + - 1. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; |  |  |  | |  | |
| * + - 1. pembatasan kegiatan usaha tertentu; |  |  |  | |  | |
| * + - 1. pembatalan persetujuan; dan |  |  |  | |  | |
| * + - 1. denda administratif. |  |  |  | |  | |
| * + 1. Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Dalam hal PVML dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang: |  |  |  | |  | |
| * + - 1. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan PVML; | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (6) huruf a. |  |  | |  | |
| * + - 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (6) huruf b. |  |  | |  | |
| * + - 1. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| KOMITE |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Dalam membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada PVML yang memiliki total aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib membentuk: | Cukup jelas |  |  | |  | |
| * 1. komite audit; |  |  |  | |  | |
| * 1. komite pemantau risiko; dan |  |  |  | |  | |
| * 1. komite remunerasi dan nominasi. |  |  |  | |  | |
| 1. Selain komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris PVML dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. | Komite lain yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris antara lain komite tata kelola perusahaan (*governance*). |  |  | |  | |
| 1. Komite yang dibentuk Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite yang dibentuk Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| * + 1. Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a, wajib beranggotakan paling sedikit: |  |  |  | |  | |
| * + - * 1. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua; dan | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + - * 1. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. audit; |  |  |  | |  | |
| 1. keuangan; atau |  |  |  | |  | |
| 1. akuntansi, |  |  |  | |  | |
| yang berkedudukan sebagai anggota.` |  |  |  | |  | |
| * + 1. Bagi PVML yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan PVML yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki UUS, DPS dapat menjadi anggota komite audit. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Keahlian Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan paling sedikit dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite. | Sertifikat kompetensi antara lain sertifikat di bidang manajemen risiko, akuntan publik, akuntan, dan auditor |  |  | |  | |
| * + 1. Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + - * 1. pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit; dan |  |  |  | |  | |
| * + - * 1. pemantauan atas tindak lanjut hasil audit, |  |  |  | |  | |
| dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. |  |  |  | |  | |
| * + 1. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan paling sedikit terhadap: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + - * 1. pelaksanaan tugas satuan kerja audit internal; |  |  |  | |  | |
| * + - * 1. kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit; |  |  |  | |  | |
| * + - * 1. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan |  |  |  | |  | |
| * + - * 1. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit internal, auditor ekstenal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain, |  |  |  | |  | |
| guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. |  |  |  | |  | |
| * + 1. Selain pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), komite audit berperan dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| * + 1. Komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b, wajib beranggotakan paling sedikit: |  |  |  | |  | |
| * + - * 1. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua; dan | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + - * 1. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan/atau manajemen risiko yang berkedudukan sebagai anggota. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Bagi PVML yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan PVML yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki UUS, DPS dapat menjadi anggota komite pemantau risiko. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Keahlian Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan paling sedikit dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite. | Sertifikat manajemen risiko sebagaimana yang berlaku bagi Direksi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia PVML.  Sertifikat kompetensi antara lain sertifikat di bidang manajemen risiko, akuntan publik, akuntan, dan auditor. |  |  | |  | |
| * + 1. Komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada (1) wajib melaksanakan: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + - * 1. evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan PVML; dan |  |  |  | |  | |
| * + - * 1. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko. |  |  |  | |  | |
| * + 1. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| * + 1. Komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c, wajib beranggotakan paling sedikit: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + - * 1. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang berkedudukan sebagai ketua; |  |  |  | |  | |
| * + - * 1. 1 (satu) orang Dewan Komisaris; dan |  |  |  | |  | |
| * + - * 1. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia. |  |  |  | |  | |
| * + 1. Komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + - * 1. melakukan evaluasi dan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi; dan |  |  |  | |  | |
| * + - * 1. menyusun dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan nominasi, antara lain: |  |  |  | |  | |
| 1. mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau DPS kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; |  |  |  | |  | |
| 1. mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon DPS kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; |  |  |  | |  | |
| 1. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b serta anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b; dan |  |  |  | |  | |
| 1. menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS. |  |  |  | |  | |
| * + 1. Bagi PVML yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan PVML yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki UUS, DPS dapat menjadi anggota komite remunerasi dan nominasi. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| Mantan anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, atau pihak yang mempunyai hubungan dengan PVML yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Pihak Independen dalam anggota komite pada PVML yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b dan Pasal 71 ayat (1) huruf b. | Pihak yang mempunyai hubungan dengan PVML yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen merupakan pihak yang memiliki hubungan kontraktual dengan PVML, sehingga masa tunggu dimulai sejak berakhirnya hubungan kontraktual.  Yang dimaksud dengan “masa tunggu” atau *cooling off* adalah tenggang waktu antara saat berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau hubungan lain dengan PVML, dengan saat pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Pihak Independen anggota komite. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. PVML wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite untuk komite yang dibentuk Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68. | Pedoman dan tata tertib kerja komite dikenal juga sebagai piagam komite. |  |  | |  | |
| 1. Pedoman dan tata tertib kerja komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. tujuan pembentukan komite; |  |  |  | |  | |
| 1. tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite; |  |  |  | |  | |
| 1. struktur dan keanggotaan komite; |  |  |  | |  | |
| 1. rapat komite, kuorum, dan pengambilan keputusan; |  |  |  | |  | |
| 1. masa tugas anggota komite dari Pihak Independen; |  |  |  | |  | |
| 1. mekanisme evaluasi kinerja; dan |  |  |  | |  | |
| 1. periode reviu pedoman dan tata tertib kerja komite secara berkala. |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| Rapat komite diselenggarakan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja yang telah ditetapkan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Keputusan rapat komite terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Hasil rapat komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*)yang terjadi dalam rapat komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Anggota komite yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat komite berhak menerima salinan risalah rapat komite. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Jumlah rapat komite yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota komite harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola yang Baik. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| * + 1. PVML yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), Pasal 69, Pasal 70 ayat (1), ayat (4), dan ayat (7), Pasal 71 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 72 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 73, Pasal 74 ayat (1), dan/atau Pasal 76 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi administratif berupa: | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (1). |  |  | |  | |
| * + - 1. peringatan tertulis; |  |  |  | |  | |
| * + - 1. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; |  |  |  | |  | |
| * + - 1. pembatasan kegiatan usaha tertentu; |  |  |  | |  | |
| * + - 1. pembatalan persetujuan; dan |  |  |  | |  | |
| * + - 1. denda administratif. |  |  |  | |  | |
| * + 1. Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Dalam hal PVML dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang: |  |  |  | |  | |
| * + - 1. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan PVML; | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (6) huruf a. |  |  | |  | |
| * + - 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (6) huruf b. |  |  | |  | |
| * + - 1. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| MANAJEMEN RISIKO |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. PVML menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan PVML. | Penerapan manajemen risiko secara efektif merupakan bagian dari penerapan model tata kelola risiko tiga lini (*three lines of defenses*). Fungsi dan peran masing-masing lini dalam model tata kelola risiko tiga lini (*three lines of defenses*) adalah sebagai berikut:   1. lini pertama sebagai unit pemilik risiko merupakan unit yang langsung mengidentifikasi dan mengelola Risiko dalam proses bisnis; 2. lini kedua sebagai fungsi manajemen risiko dan kepatuhan independen merupakan unit yang mengukur, memantau dan memperlakukan Risiko secara agregat, mengembangkan metodologi dan kebijakan manajemen risiko PVML; dan 3. lini ketiga sebagai fungsi audit internal merupakan unit yang memastikan tata kelola dan pengendalian Risiko diterapkan secara efektif oleh PVML. |  |  | |  | |
| 1. Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembentukan satuan kerja manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi PVML. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| FUNGSI KEPATUHAN |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. PVML wajib memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Untuk memastikan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PVML wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. | Yang dimaksud dengan “fungsi kepatuhan” adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh PVML telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memastikan kepatuhan PVML terhadap komitmen yang dibuat oleh PVML kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. |  |  | |  | |
| 1. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit: |  |  |  | |  | |
| 1. merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan; | Yang dimaksud dengan “budaya kepatuhan” adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah bagi PVML.  Strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan dilakukan melalui antara lain:   1. penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai PVML; 2. penyusunan kebijakan kepatuhan dan budaya kerja dengan mempertimbangkan penghargaan (*reward*) dan pendisiplinan (*punishment*) yang tepat; dan 3. peningkatan kompetensi kepatuhan yang berkelanjutan. |  |  |  | |
| 1. memastikan kegiatan usaha PVML memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan | Langkah yang dilakukan untuk memastikan kegiatan usaha PVML memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan melalui antara lain:   1. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan serta menetapkan atau mengevaluasi ketentuan dan pedoman internal PVML; 2. menyesuaikan kebijakan dan pedoman internal BPR dan BPR Syariah terhadap perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. mencegah agar Direksi tidak menetapkan kebijakan atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. mengkaji ulang tata cara atau prosedur pengambilan keputusan oleh manajemen; 5. menindaklanjuti penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi dengan melaporkan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan; dan 6. memastikan penyelesaian komitmen oleh Direksi dan satuan kerja atau unit kerja terkait. |  |  | |  | |
| 1. tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan. | Tugas lain antara lain:   1. menyelenggarakan sosialisasi ketentuan internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. menindaklanjuti permintaan data atau informasi oleh otoritas. |  |  | |  | |
| 1. PVML wajib memastikan bahwa anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dirangkap oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi pembiayaan, fungsi pemasaran, dan fungsi keuangan, kecuali direktur utama. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. PVML yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib membentuk satuan kerja kepatuhan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. PVML yang memiliki aset sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki fungsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kepatuhan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |  |
| 1. Satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan satuan kerja manajemen risiko dapat digabungkan menjadi 1 (satu) satuan kerja yang menangani kepatuhan dan manajemen risiko. | Penggabungan menjadi 1 (satu) satuan kerja dilakukan jika PVML dapat memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab manajemen risiko dan kepatuhan. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Satuan kerja atau fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) bertugas membantu Direksi dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang PVML dan peraturan perundang-undangan lainnya. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Satuan kerja atau fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| * + 1. PVML yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dan/atau Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi administratif berupa: | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (1). |  |  | |  | |
| * + - 1. peringatan tertulis; |  |  |  | |  | |
| * + - 1. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; |  |  |  | |  | |
| * + - 1. pembatasan kegiatan usaha tertentu; |  |  |  | |  | |
| * + - 1. pembatalan persetujuan; dan |  |  |  | |  | |
| * + - 1. denda administratif. |  |  |  | |  | |
| * + 1. Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Dalam hal PVML dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang: |  |  |  | |  | |
| * + - 1. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan PVML; | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (6) huruf a. |  |  | |  | |
| * + - 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (6) huruf b. |  |  | |  | |
| * + - 1. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| FUNGSI AUDIT INTERNAL |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. PVML wajib menerapkan fungsi audit internal secara efektif. | Penerapan fungsi audit internal merupakan bagian dari penerapan model tata kelola risiko tiga lini (*three lines of defenses*). Fungsi dan peran masing-masing lini dalam model tata kelola risiko tiga lini (*three lines of defenses*) adalah sebagai berikut:   1. lini pertama sebagai unit pemilik risiko merupakan unit yang langsung mengidentifikasi dan mengelola Risiko dalam proses bisnis; 2. lini kedua sebagai fungsi manajemen risiko dan kepatuhan independen merupakan unit yang mengukur, memantau dan memperlakukan Risiko secara agregat, mengembangkan metodologi dan kebijakan manajemen risiko PVML; dan 3. lini ketiga sebagai fungsi audit internal merupakan unit yang memastikan tata kelola dan pengendalian Risiko diterapkan secara efektif oleh PVML. |  |  | |  | |
| 1. PVML yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), wajib membentuk satuan kerja audit internal. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Satuan kerja audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Satuan kerja audit internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit: |  |  |  | |  | |
| 1. menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan; | Audit dikenal juga sebagai pemeriksaan.  Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan khusus, termasuk yang berasal dari inisiatif PVML maupun permintaan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  | |  | |
| 1. membantu tugas direktur utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional PVML, terutama untuk melakukan pemantauan atas hasil audit; | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain; dan | Dalam membuat analisis dan penilaian, satuan kerja audit internal atau fungsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit internal antara lain mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. |  |  | |  | |
| 1. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. PVML wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja audit internal yang memuat paling sedikit: | Pedoman dan tata tertib kerja audit internal dikenal juga sebagai piagam audit internal. |  |  | |  | |
| 1. tugas, tanggung jawab, dan wewenang |  |  |  | |  | |
| 1. persyaratan dan kode etik auditor internal; dan |  |  |  | |  | |
| 1. mekanisme koordinasi dan pertanggungjawaban hasil audit internal. |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| * + 1. PVML yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 84 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi administratif berupa: | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (1). |  |  | |  | |
| * + - 1. peringatan tertulis; |  |  |  | |  | |
| * + - 1. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; |  |  |  | |  | |
| * + - 1. pembatasan kegiatan usaha tertentu; |  |  |  | |  | |
| * + - 1. pembatalan persetujuan; dan |  |  |  | |  | |
| * + - 1. denda administratif. |  |  |  | |  | |
| * + 1. Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Dalam hal PVML dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang: |  |  |  | |  | |
| * + - 1. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan PVML; | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (6) huruf a. |  |  | |  | |
| * + - 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (6) huruf b. |  |  | |  | |
| * + - 1. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| AUDITOR EKSTERNAL |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Dalam menyediakan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, PVML menggunakan jasa auditor eksternal yang dilakukan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Penggunaan dan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pada PVML sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| BENTURAN KEPENTINGAN |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| * + 1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite PVML, DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai PVML harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan PVML. | Ketentuan benturan kepentingan ini pada dasarnya dimaksudkan agar anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite PVML, DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai PVML tidak ikut serta dalam pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi yang terdapat benturan kepentingan. Namun demikian, ketika keputusan tetap harus diambil maka pihak dimaksud harus mengutamakan kepentingan ekonomis PVML serta menghindarkan PVML dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan PVML, dan mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dalam setiap keputusan. |  |  | |  | |
| * + 1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite PVML, DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai PVML wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Selain mengungkapkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite PVML, DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai PVML dilarang mengambil tindakan yang berpotensi merugikan PVML atau mengurangi keuntungan PVML. | Contoh benturan kepentingan yang berpotensi merugikan PVML atau mengurangi keuntungan PVML, antara lain pemberian perlakuan istimewa kepada pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan serta pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan. |  |  | |  | |
| * + 1. PVML wajib memiliki kebijakan benturan kepentingan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola adanya potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul dalam PVML akibat dari pelaksanaan kegiatan usaha PVML, yang dituangkan dalam aturan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| * + 1. PVML yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi administratif berupa: | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (1). |  |  | |  | |
| * + - 1. peringatan tertulis; |  |  |  | |  | |
| * + - 1. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; |  |  |  | |  | |
| * + - 1. pembatasan kegiatan usaha tertentu; |  |  |  | |  | |
| * + - 1. pembatalan persetujuan; dan |  |  |  | |  | |
| * + - 1. denda administratif. |  |  |  | |  | |
| * + 1. Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Dalam hal PVML dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang: |  |  |  | |  | |
| * + - 1. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan PVML; | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (6) huruf a. |  |  | |  | |
| * + - 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (6) huruf b. |  |  | |  | |
| * + - 1. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| KEBIJAKAN REMUNERASI |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. PVML wajib menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai PVML yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent behaviour*) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang PVML dan perlakuan adil terhadap Debitur, penerima dana, kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban PVML sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; |  |  |  | |  | |
| 1. prestasi kerja individual; |  |  |  | |  | |
| 1. kewajaran dengan PVML dan/atau level jabatan yang setara (*peer group*); dan |  |  |  | |  | |
| 1. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang PVML. |  |  |  | |  | |
| 1. PVML wajib menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai PVML memuat paling sedikit: | Yang dimaksud dengan “remunerasi” adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai PVML dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang, antara lain gaji pokok, fasilitas, tunjangan, pensiun, bonus, atau tantiem.  Yang dimaksud dengan “pegawai PVML” adalah pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. |  |  | |  | |
| 1. struktur remunerasi paling sedikit: |  |  |  | |  | |
| 1. skala remunerasi berdasarkan tingkat dan jabatan; dan |  |  |  | |  | |
| 1. komponen remunerasi; dan |  |  |  | |  | |
| 1. metode dan mekanisme penetapan remunerasi. |  |  |  | |  | |
| 1. Bagi PVML yang memiliki komite remunerasi dan nominasi, penyusunan kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. PVML dapat menunda pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*malus*) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*clawback*) dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh PVML. | Yang dimaksud dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh PVML antara lain PVML mengalami kerugian, terjadinya risiko yang berdampak negatif terhadap keuangan PVML, dan terjadi *fraud* yang dilakukan oleh pihak yang menjadi *material risk takers* yang merugikan PVML. |  |  | |  | |
| 1. Dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + - * 1. melakukan kaji ulang terhadap besaran remunerasi yang bersifat variabel bagi Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan/atau pegawai PVML; |  |  |  | |  | |
| * + - * 1. melakukan evaluasi terhadap pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan keadilan; dan/atau |  |  |  | |  | |
| * + - * 1. memerintahkan PVML untuk melakukan penyesuaian kebijakan remunerasi yang bersifat variabel. |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| * + 1. PVML yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan/atau ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi administratif berupa: | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (1). |  |  | |  | |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  | |  | |
| 1. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; |  |  |  | |  | |
| 1. pembatasan kegiatan usaha tertentu; |  |  |  | |  | |
| 1. pembatalan persetujuan; dan |  |  |  | |  | |
| 1. denda administratif. |  |  |  | |  | |
| * + 1. Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Dalam hal PVML dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang: |  |  |  | |  | |
| * + - 1. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan PVML; | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (6) huruf a. |  |  | |  | |
| * + - 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (6) huruf b. |  |  | |  | |
| * + - 1. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| KETERBUKAAN INFORMASI |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| PVML wajib mengungkapkan mengenai: |  |  |  | |  | |
| * + - * 1. kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada PVML tempat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat dan/atau pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; | Yang dimaksud dengan “perusahaan lain” adalah lembaga jasa keuangan atau non lembaga jasa keuangan di dalam maupun di luar negeri, termasuk pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham pengendali terakhir PVML. |  |  | |  | |
| * + - * 1. hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, DPS, pemegang saham PVML, dan/atau pegawai PVML tempat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat; dan | Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga” adalah hubungan suami/istri atau hubungan keluarga baik vertikal maupun horizontal, meliputi:   1. orang tua kandung/tiri/angkat; 2. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istri; 3. anak kandung/tiri/angkat; 4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat; 5. cucu kandung/tiri/angkat; 6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istri; 7. suami atau istri; 8. mertua; 9. besan; 10. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat; 11. kakek atau nenek dari suami atau istri; 12. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau 13. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri. |  |  | |  | |
| * + - * 1. remunerasi dan fasilitas yang diterima, | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| dalam laporan penerapan Tata Kelola yang Baik. |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| PVML wajib mengungkapkan mengenai: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal; |  |  |  | |  | |
| 1. transaksi material dengan pihak terkait; |  |  |  | |  | |
| 1. Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi; dan |  |  |  | |  | |
| 1. informasi material lain mengenai PVML, |  |  |  | |  | |
| dalam laporan penerapan Tata Kelola yang Baik. |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Kebijakan keterbukaan informasi PVML wajib berdasarkan prinsip lengkap, akurat, kini, dan utuh. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. PVML wajib memiliki sistem informasi manajemen yang andal dan memadai untuk: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; |  |  |  | |  | |
| 1. meningkatkan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris; dan |  |  |  | |  | |
| 1. keperluan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Pemangku Kepentingan lain. |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| * + 1. PVML yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pasal 93, dan/atau Pasal 94 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi administratif berupa: | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (1). |  |  | |  | |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  | |  | |
| 1. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; |  |  |  | |  | |
| 1. pembatasan kegiatan usaha tertentu; |  |  |  | |  | |
| 1. pembatalan persetujuan; dan |  |  |  | |  | |
| 1. denda administratif. |  |  |  | |  | |
| * + 1. Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Dalam hal PVML dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang: |  |  |  | |  | |
| * + - 1. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan PVML; | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (6) huruf a. |  |  | |  | |
| * + - 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (6) huruf b. |  |  | |  | |
| * + - 1. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| ETIKA BISNIS |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| PVML wajib membuat pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha, sebagai panduan bagi Organ PVML dan seluruh pegawai PVML. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| PVML dilarang melakukan tindakan yang ditujukan untuk memanfaatkan celah ketentuan atau etika bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan PVML yang sehat, yang dapat meningkatkan risiko bagi PVML, dan/atau mendatangkan keuntungan yang tidak wajar. | Tindakan yang dilarang antara lain:   1. pemanfaatan celah ketentuan yang ada maupun yang belum diatur yang dapat berimplikasi meningkatkan risiko PVML secara keseluruhan; dan 2. rekrutmen karyawan yang dilakukan oleh PVML yang berasal dari PVML lain secara masif sehingga menyebabkan terganggunya keberlangsungan kegiatan operasional PVML dimaksud. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai PVML dilarang menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk memengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan usaha PVML, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai PVML dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan usaha PVML. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| * + 1. PVML yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Pasal 97, dan/atau Pasal 98 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi administratif berupa: | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (1). |  |  | |  | |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  | |  | |
| 1. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; |  |  |  | |  | |
| 1. pembatasan kegiatan usaha tertentu; |  |  |  | |  | |
| 1. pembatalan persetujuan; dan |  |  |  | |  | |
| 1. denda administratif. |  |  |  | |  | |
| * + 1. Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Dalam hal PVML dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang: |  |  |  | |  | |
| * + - 1. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan PVML; | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (6) huruf a. |  |  | |  | |
| * + - 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (6) huruf b. |  |  | |  | |
| * + - 1. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| KEBIJAKAN PEMBIAYAAN |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. PVML wajib memiliki kebijakan dan prosedur penyaluran pembiayaan secara tertulis. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Kebijakan dan prosedur penyaluran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan |  |  |  | |  | |
| 1. organisasi dan manajemen pembiayaan |  |  |  | |  | |
| 1. kebijakan persetujuan pembiayaan; |  |  |  | |  | |
| 1. dokumentasi dan administrasi pembiayaan; |  |  |  | |  | |
| 1. pengawasan pembiayaan; dan |  |  |  | |  | |
| 1. penyelesaian pembiayaan bermasalah. |  |  |  | |  | |
| 1. Kebijakan dan prosedur penyaluran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. ditetapkan oleh Direksi; |  |  |  | |  | |
| 1. disetujui oleh Dewan Komisaris; dan |  |  |  | |  | |
| 1. disosialisasikan kepada manajemen dan pegawai di unit kerja terkait. |  |  |  | |  | |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur mengenai penyaluran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. PVML wajib memastikan Direksi dan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi mengambil keputusan pembiayaan secara profesional dan mengoptimalkan nilai tambah kekayaan PVML dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Debitur dan kepentingan bagi Pemangku Kepentingan lainnya. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. PVML wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur pengendalian internal untuk memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur mengenai penyaluran pembiayaan, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| * + 1. PVML yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) dan/atau Pasal 101 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi administratif berupa: | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (1). |  |  | |  | |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  | |  | |
| 1. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; |  |  |  | |  | |
| 1. pembatasan kegiatan usaha tertentu; |  |  |  | |  | |
| 1. pembatalan persetujuan; dan |  |  |  | |  | |
| 1. denda administratif. |  |  |  | |  | |
| * + 1. Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Dalam hal PVML dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang: |  |  |  | |  | |
| * + - 1. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan PVML; | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (6) huruf a. |  |  | |  | |
| * + - 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (6) huruf b. |  |  | |  | |
| * + - 1. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. PVML menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha dan menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Penerapan keuangan berkelanjutan serta pengenaan sanksi administratif terkait pelanggaran ketentuan, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Ketentuan penerapan keuangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro. |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| RENCANA BISNIS |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. PVML harus menyusun rencana bisnis secara realistis. | Yang dimaksud dengan “menyusun rencana bisnis secara realistis” adalah menyusun rencana bisnis dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha PVML, prinsip kehatihatian, dan asas lembaga jasa keuangan yang sehat, termasuk prinsip syariah bagi PVML yang melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, sehingga terukur dan dapat dicapai. |  |  | |  | |
| 1. Penyesuaian rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bagi lembaga jasa keuangan nonbank. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Ketentuan mengenai rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha kecil. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| PELAPORAN TATA KELOLA YANG BAIK |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. PVML wajib melakukan penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola yang Baik secara berkala. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Hasil penilaian sendiri oleh PVML atas penerapan Tata Kelola yang Baik pada PVML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan tata kelola. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| * + 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola yang Baik. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta PVML untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu untuk meningkatkan hasil penilaian penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). | Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu untuk meningkatkan penerapan Tata Kelola yang Baik” antara lain:   1. menambah jumlah anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dalam hal jumlah anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang ada dinilai tidak efektif dan efisien; dan 2. menambahkan informasi mengenai transparansi kepemilikan saham kurang dari 5% (lima persen) oleh anggota Direksi pada PVML tempat anggota Direksi dimaksud menjabat dan/atau pada perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri, dalam hal anggota Direksi dimaksud terbukti melakukan pengendalian. |  |  | |  | |
| * + 1. PVML wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. PVML wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola yang Baik pada setiap akhir tahun buku. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Laporan penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: |  |  |  | |  | |
| 1. transparansi penerapan Tata Kelola yang Baik yang mengungkapkan seluruh aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); |  |  |  | |  | |
| 1. penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105; dan |  |  |  | |  | |
| 1. rencana tindak yang meliputi tindakan korektif yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola yang Baik. |  |  |  | |  | |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Laporan penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Dalam hal tanggal 30 April sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah hari libur, maka batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah tanggal 30 April dimaksud. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Bagi PVML yang menerapkan penilaian tingkat kesehatan dengan faktor Tata Kelola yang Baik, laporan penerapan Tata Kelola yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan penilaian tingkat kesehatan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Penyampaian laporan penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| * + 1. PVML yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1), Pasal 106 ayat (3), dan/atau Pasal 107 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi administratif berupa: | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (1). |  |  | |  | |
| 1. peringatan tertulis; |  |  |  | |  | |
| 1. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha; |  |  |  | |  | |
| 1. pembatasan kegiatan usaha tertentu; |  |  |  | |  | |
| 1. pembatalan persetujuan; dan |  |  |  | |  | |
| 1. denda administratif. |  |  |  | |  | |
| * + 1. Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Dalam hal PVML dan UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang: |  |  |  | |  | |
| * + - 1. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan PVML; | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (6) huruf a. |  |  | |  | |
| * + - 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau | Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (6) huruf b. |  |  | |  | |
| * + - 1. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| PENYESUAIAN PENERAPAN TATA KELOLA |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. PVML yang berdasarkan: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * 1. laporan keuangan tahunan PVML yang telah diaudit oleh akuntan publik, bagi PVML yang diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik; atau |  |  |  | |  | |
| * 1. laporan keuangan periode bulan Desember, bagi PVML yang tidak diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik, |  |  |  | |  | |
| mengalami peningkatan aset sehingga menjadi paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib memenuhi ketentuan berdasarkan ekuitas yang baru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 1 (satu) tahun setelah PVML tanggal laporan keuangan. |  |  |  | |  | |
| 1. PVML yang berdasarkan: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. laporan keuangan tahunan PVML yang telah diaudit oleh akuntan publik, bagi PVML yang diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik; atau |  |  |  | |  | |
| 1. laporan keuangan periode bulan Desember, bagi PVML yang tidak diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik, |  |  |  | |  | |
| mengalami penurunan aset sehingga menjadi kurang dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dapat melakukan penyesuaian pemenuhan terhadap ketentuan berdasarkan ekuitas yang baru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| KETENTUAN LAIN-LAIN |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Pemberian persetujuan atau kebijakan yang berbeda dimaksudkan antara lain untuk:   * 1. mendukung kebijakan nasional;   2. menjaga kepentingan publik;   3. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau   4. menjaga persaingan usaha yang sehat.   Contoh kondisi yang memerlukan pertimbangan tertentu adalah kejadian luar biasa yang selanjutnya disingkat KLB dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang besar, yang juga berdampak pada ekonomi dan sosial, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan oleh semua pihak terkait serta diatur dalam ketentuan lain atas pertimbangan dalam menghadapi kemungkinan KLB. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| KETENTUAN PERALIHAN |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Bagi Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pergadaian, dan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), ketentuan jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Bagi Lembaga Keuangan Mikro yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), ketentuan jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus dipenuhi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Bagi Perusahaan Pergadaian dan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan memiliki aset sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), ketentuan jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Bagi Lembaga Keuangan Mikro yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan memiliki aset sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), ketentuan jumlah minimum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus dipenuhi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Bagi PVML yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, ketentuan mengenai kewajiban pengangkatan salah seorang anggota Direksi sebagai direktur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Bagi Direksi PVML yang telah menjabat sebagai direktur utama pada PVML namun belum berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, tetap dapat menjabat sepanjang tidak melakukan perpanjangan atau pergantian jabatan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Ketentuan mengenai kewajiban Direktur utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dinyatakan berlaku dalam hal Direksi melakukan perpanjangan atau pergantian jabatan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung kurang dari 25% (dua puluh lima persen), ketentuan seluruh anggota Direksi merupakan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 25% (dua puluh lima persen), ketentuan perbandingan jumlah anggota Dewan Komisaris yang merupakan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) harus dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| Bagi Direksi, Dewan Komisaris, atau DPS PVML yang telah melakukan rangkap jabatan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku tetap dapat menjabat hingga masa jabatan atas jabatan yang dirangkap berakhir. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Anggota Direksi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar yang telah menjabat pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan belum mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), anggota Direksi dimaksud tetap dapat menjabat sebagai anggota Direksi sampai dengan berakhirnya masa jabatan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Pengelola Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar yang telah menjabat pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan belum mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), pengelola dimaksud tetap dapat menjabat sebagai pengelola sampai dengan berakhirnya masa jabatan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Anggota Direksi dan pengelola Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sebelum yang bersangkutan dilakukan perpanjangan jabatan atau peralihan jabatan pada perusahaan yang sama. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Bagi Perusahaan Modal Ventura yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), ketentuan jumlah minimum anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Bagi Perusahaan Pergadaian dan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), ketentuan jumlah minimum anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Bagi Lembaga Keuangan Mikro yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), ketentuan jumlah minimum anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus dipenuhi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Bagi Perusahaan Pergadaian dan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan memiliki aset sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), ketentuan jumlah minimum anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) harus dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Bagi Lembaga Keuangan Mikro yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan memiliki aset sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), ketentuan jumlah minimum anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) harus dipenuhi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pergadaian, dan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, ketentuan mengenai kewajiban jumlah Dewan Komisaris paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) harus dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Bagi Lembaga Keuangan Mikro yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, ketentuan mengenai kewajiban jumlah Dewan Komisaris paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) harus dipenuhi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| Bagi PVML yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, ketentuan mengenai kewajiban pengangkatan salah seorang anggota Dewan Komisaris sebagai komisaris utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung kurang dari 25% (dua puluh lima persen), ketentuan seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) harus dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 25% (dua puluh lima persen), ketentuan perbandingan jumlah anggota Dewan Komisaris yang merupakan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) harus dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| Bagi Dewan Komisaris PVML yang telah melakukan rangkap jabatan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku tetap dapat menjabat hingga masa jabatan atas jabatan yang dirangkap berakhir. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Anggota Dewan Komisaris Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar yang telah menjabat pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan belum mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), anggota Dewan Komisaris dimaksud tetap dapat menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris sampai dengan berakhirnya masa jabatan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Anggota Dewan Komisaris Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sebelum yang bersangkutan dilakukan perpanjangan jabatan atau peralihan jabatan pada perusahaan yang sama. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Bagi Perusahaan Modal Ventura yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), ketentuan jumlah minimum Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Bagi Perusahaan Pergadaian dan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), ketentuan jumlah minimum Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Bagi Lembaga Keuangan Mikro yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), ketentuan jumlah minimum Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 harus dipenuhi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| Bagi DPS yang telah melakukan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku tetap dapat menjabat hingga masa jabatan atas jabatan yang dirangkap berakhir. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. DPS Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar yang telah menjabat pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan belum pernah mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) tetap dapat menjadi DPS sampai dengan berakhirnya masa jabatan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. DPS Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sebelum yang bersangkutan dilakukan perpanjangan jabatan atau peralihan jabatan pada perusahaan yang sama. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pergadaian, dan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, ketentuan mengenai pembentukan komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dinyatakan berlaku 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, ketentuan mengenai pembentukan komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dinyatakan berlaku 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Bagi Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pergadaian, dan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, ketentuan mengenai kewajiban memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dinyatakan berlaku 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Bagi Lembaga Keuangan Mikro skala usaha besar yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, ketentuan mengenai kewajiban memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dinyatakan berlaku 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan pada Perusahaan Pembiayaan atau Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang telah melakukan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku tetap dapat menjabat hingga masa jabatan atas jabatan yang dirangkap berlaku. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Bagi Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pergadaian, dan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, ketentuan mengenai kewajiban membentuk satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dinyatakan berlaku 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Bagi Lembaga Keuangan Mikro yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, ketentuan mengenai kewajiban membentuk satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dinyatakan berlaku 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pergadaian, dan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, ketentuan mengenai kewajiban memiliki fungsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dinyatakan berlaku 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Bagi Lembaga Keuangan Mikro yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, ketentuan mengenai kewajiban memiliki fungsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dinyatakan berlaku 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, dan Perusahaan Pergadaian yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, ketentuan mengenai kewajiban membentuk satuan kerja audit internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) dinyatakan berlaku 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Bagi Lembaga Keuangan Mikro yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, ketentuan mengenai kewajiban membentuk satuan kerja audit internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) dinyatakan berlaku 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pergadaian, dan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, ketentuan mengenai penerapan kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) dinyatakan berlaku 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Bagi Lembaga Keuangan Mikro yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, ketentuan mengenai penerapan kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) dinyatakan berlaku 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Setiap rencana pemenuhan Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dinyatakan tetap sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan dinyatakan tetap sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur berdasarkan Pasal 71 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dinyatakan tetap sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Perusahaan Modal Ventura berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura dinyatakan tetap sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap LKM berdasarkan Pasal 34 dan Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro dinyatakan tetap sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Perusahaan Pergadaian berdasarkan Pasal 60 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian dinyatakan tetap sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dinyatakan tetap sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| 1. Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Perusahaan Pergadaian, dan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang belum dapat mengatasi penyebab disampaikannya rencana pemenuhan atau dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dikenai sanksi administratif lanjutan sesuai dengan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| KETENTUAN PENUTUP |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| 1. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5913); |  |  |  | |  | |
| * 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 46 /POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6576); |  |  |  | |  | |
| * 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6991); |  |  |  | |  | |
| * 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2/OJK); |  |  |  | |  | |
| dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  | |  | |
| 1. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + - * 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5639) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6505); dan |  |  |  | |  | |
| * + - * 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5788), |  |  |  | |  | |
| dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |  |  |  | |  | |
| 1. Peraturan pelaksanaan dari: | Cukup jelas. |  |  | |  | |
| * + - * 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5639) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6505); dan |  |  |  | |  | |
| * + - * 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5788), |  |  |  | |  | |
| dinyatakan tetap berlaku bagi Perusahaan Pembiayaan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | Cukup jelas. |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |
| Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal 2024  KETUA DEWAN KOMISIONER  OTORITAS JASA KEUANGAN,  MAHENDRA SIREGAR |  |  |  | |  | |
| Diundangkan di Jakarta  pada tanggal  MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  REPUBLIK INDONESIA,  YASONNA H. LAOLY  LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR | TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ….. |  |  | |  | |